



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA WISATA

Sulis Winurini
Peneliti Madya
sulis.winurini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Setelah terkena pandemi Covid-19 lebih dari 2 tahun, fokus pemerintah saat ini mengarah pada pemulihan pembangunan, termasuk di antaranya adalah pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf). Tren wisata berubah dari wisata massal dan juga wisata alternatif menjadi kegiatan wisata yang berorientasi pada wisata alam atau budaya lokal, termasuk wisata yang menawarkan pengalaman langsung di pedesaan. Hal ini membuka peluang sektor parekraf untuk bangkit dari pandemi Covid-19.

Desa wisata dianggap sebagai bentuk terbaik wisata berbasis masyarakat yang inklusif. Pada program desa wisata, Kemenparekraf mengintegrasikan akomodasi dan daya tarik lokal yang saling melengkapi di bawah tata kelola desa dengan kearifan lokal. Desa wisata semakin melengkapi pilihan akomodasi dan wisata yang akan terus berkembang. Beragam pemangku kepentingan tampaknya perlu terus giat berkolaborasi agar industri pariwisata benar-benar melaju di jalur pemulihan.

Pengembangan desa wisata dimulai saat pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang PNPM Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang PNPM Mandiri Pariwisata, serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dukungan terhadap pembangunan dan pengembangan desa wisata juga menjadi amanat Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 serta Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024.

Pelaksanaan program pengembangan desa wisata diwujudkan melalui kerja sama beberapa kementerian/lembaga, yaitu Kemenparekraf/Baparekraf RI, Kemendes PDTT RI, Kemenkop RI, Kemkominfo RI, KemBUMN RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, serta berbagai pemangku kepentingan lain seperti, ASITA (*Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies*), AELI (*Asosiasi Experiential Learning Indonesia*), Masata (*Masyarakat Sadar Wisata*), Sahabat UMKM, dan lain-lain, hingga perguruan tinggi. Kementerian Desa PDTT berencana agar Program Desa Wisata dapat dilaksanakan di 244 desa sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Kemenparekraf/Baparekraf, dari 244 desa wisata, terklasifikasi 54 (22,13%) desa wisata rintisan, 142 (58%) desa wisata berkembang, dan 48 (20%) desa wisata maju.

Jumlah desa yang mandiri membangun desa wisata meningkat dari 62 pada tahun 2017, menjadi 817 tahun 2018, bahkan melonjak sampai 4.071 pada tahun 2019. APBDes yang dialokasikan dari Rp123 miliar pada 2017 naik terus menjadi Rp229 miliar pada 2018, dan berlipat menjadi Rp552 miliar pada 2019. Pengembangan desa wisata diperkirakan dapat menciptakan 0,06% PDB nasional akibat pengeluaran wisatawan nusantara maupun mancanegara. Akan ada penambahan pendapatan rumah tangga (0,03% terhadap konsumsi rumah tangga dalam PDB) dan kesempatan kerja (0,26% dari tenaga kerja nasional).

Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal. Namun faktanya, komitmen masyarakat belum sepenuhnya satu kata dalam pengembangan desanya sebagai desa wisata. Pemahaman masyarakat tentang desa wisata, manfaat dan prinsip-prinsip dalam pengembangan desa wisata masih dirasakan kurang. Sebagian masyarakat berpikir bahwa penyelenggaraan dan pengembangan desa wisata hanya sekadar proyek pemerintah. Infrastruktur telekomunikasi kabel *fiber optic* masih terbatas, belum menjangkau tingkat desa, dan hanya digunakan oleh masyarakat perkotaan. Sebagian besar desa juga belum memiliki akses internet yang baik sehingga menyulitkan proses pendampingan dan komunikasi dengan desa.

Tidak ada data valid tentang berapa, di mana, dan siapa pengelola desa wisata dan juga tidak ada lembaga yang mengolaborasi serta mengoordinasi pengelolaan desa wisata untuk menyamakan standar dari perencanaan hingga *monitoring* dan evaluasi. Selain itu, koordinasi antarkementerian/lembaga belum berjalan dengan baik, belum merata, dan belum terlihat keberlanjutannya. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata prioritas dan superprioritas belum terintegrasi dengan desa wisata penyangga di sekitarnya sehingga masyarakat belum merasakan dampak serta manfaat secara langsung.

Atensi DPR

Komisi X perlu mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf/Baparekraf untuk dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terampil di desa wisata sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik dan berdaya saing. Kemenparekraf/Baparekraf perlu didorong sebagai *leading sector* untuk meningkatkan program pendampingan bagi masyarakat serta pengembangan desa wisata. Komisi X perlu mendorong Kemenparekraf/Baparekraf untuk memperjelas definisi desa wisata serta membuatnya menjadi regulasi sebagai dasar penganggaran di APBN dan menjadi pedoman pelaksanaan pengembangan desa wisata. Komisi X perlu mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk berkoordinasi menciptakan agenda yang terintegrasi antara destinasi pariwisata prioritas dan superprioritas dengan desa wisata penyangga di kawasan sekitarnya. Komisi X perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan akses internet dan listrik ke lokasi-lokasi desa wisata, menguatkan branding, promosi dan pemasaran desa wisata beserta produk-produknya, mengelola database tentang desa wisata.

Sumber

kompas.id, 28 Juni 2022;

mediaindonesia.com, 11 Mei 2021;

Laporan RDPU Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X dengan Masata dan Asidewi, 16 September 2021;

Laporan Singkat RDP Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X dengan Kemenparekraf/Baparekraf, 13 September 2021.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santosa
Dian Cahyaningrum
Nidya Waras Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022